



Pengaruh Akuntabilitas Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (Survei Pada Desa Di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat)

Lilis Puspitawati¹, Bella Silvia Marsellina²

¹ Universitas Komputer Indonesia, Lilis.Puspitawati@email.unikom.ac.id

² Universitas Komputer Indonesia, bella.21118078@mahasiswa.unikom.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Received :05-12-2022

Revised :08-12-2022

Accepted :10-12-2022

Keywords :

***Accountability,
Disclosure of
Information,
Performance of local
Government***

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Accountability and Information Disclosure on the Performance of Local Government Services at the Village Apparatus Work Unit (SKPDes) for each village in Parongpong District. The analytical method used in this research is descriptive analysis method and verification using a quantitative approach. The population in this study are villages in the Parongpong sub-district, West Bandung regency, which amount to 7 villages. The sampling technique in this study used the Probability Sampling technique and to obtain data using the Simple Random Sampling method so that 35 respondents were obtained in this study. The source of data in this study was primary data obtained from respondents' questionnaire answers. The statistical test used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis using SPSS Version 26.0 software analysis tool. The results of hypothesis testing in this study indicate that accountability has a positive effect on the performance of local government services, and transparency has a positive effect on the performance of local government services.

ABSTRAK

Kata Kunci :
**Akuntabilitas,
Keterbukaan
Informasi, Kinerja
pemerintahan daerah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Akuntabilitas Dan Keterbukaan Informasi, Terhadap Kinerja Pelayanan pemerintahan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDes) untuk masing-masing desa di Kecamatan Parongpong. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu desa di kecamatan parongpong kabupaten

bandung barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* dan untuk memperoleh data menggunakan metode *Simpel Random Sampling* sehingga diperoleh 35 orang responden pada penelitian ini, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis software SPSS Versi 26.0. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja pelayanan pemerintahan daerah, dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja pelayanan pemerintahan daerah.

1. PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Revolusi Industri 4.0 membutuhkan tata kelola yang baik di negara-negara di seluruh dunia (Herdiansyah, 2020). Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah memunculkan konsep yang disebut *good governance* (Ibrahim, 2015).

Tata kelola yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan antara anggota, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai proses terbuka untuk menetapkan tujuan, mencapai dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Sukrisno Agoes, 2011).

Kinerja pemerintah dari pusat hingga pemerintah daerah diatur oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999. Aparatur negara dalam menjalankan tugasnya menuai banyak perhatian, hal ini utamanya terjadi ketika masyarakat mempertanyakan atas hal yang mereka dapatkan dari pelayanan oleh para aparatur negara. Dengan demokratisnya sistem pemerintah saat ini, nyatanya masih banyak isu terhadap kinerja yang dilakukan aparatur negara, baik pusat maupun daerah. Masyarakat masih belum dapat merasakan hasil maupun manfaat yang seharusnya dari kinerja pemerintah (Syawaludin Hamdah, 2021).

Pada tahun 2021, ombudsman Jawa Barat menemukan 124 kasus pelayanan publik. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021, terdapat 1.069 termasuk kabupaten bandung barat. pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyelewengan pelayanan publik yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya pengaduan ini merupakan sebuah langkah bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja. (www.Ombudsman.go.id) .

Segala tindakan dan kegiatan pemerintah saat ini tidak akan berlangsung tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Hal ini sangat berbeda

dengan era Orde Baru, ketika pemerintah daerah hanya melakukan pengukuran dan pelaporan dalam bentuk kepatuhan dengan batasan anggaran yang diberikan. Disinilah muncul berbagai program yang tidak memberikan output bagi masyarakat luas. Hal ini juga disebabkan karena tidak mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum melaksanakan program pemerintah (Wiwik Andriani, Dkk, 2015).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang mematuhi pedoman Standar Pelayanan Publik merupakan sebuah permasalahan utama yang dihadapi dalam meningkatkan Akuntabilitas. Kurangnya sikap patuh dan tanggung jawab dalam pengimplementasian pedoman Standar Pelayanan Publik membentuk peristiwa maladministrasi. Maladministrasi diakibatkan oleh tindakan aparatur negara seperti prosedur yang kurang ditekan, periode pelayanan yang tidak pasti, pungutan tanpa adanya peraturan yang jelas, korupsi, layanan izin administrasi yang tidak pasti, kesemena-menaan. Hasan selamat mengungkapkan hal ini secara makro berimbas pada lemahnya pertanggungjawaban pemerintah dalam melayani masyarakat (www.radiodms.com).

Besarnya tuntutan terhadap perilaku akuntabilitas yang diharapkan dari pemerintah, muncul pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi terhadap masyarakat luas. Keterbukaan disajikan dalam bentuk penyajian informasi terhadap masyarakat sebagai salah satu penunaian hak-hak publik. Dengan terbuka pemerintah mampu memberikan jaminan akses dan bebasnya informasi yang didapatkan oleh semua orang mengenai bagaimana pemerintah menjalankan mandatnya, proses *input*, pelaksanaan, serta *output* yang diperoleh (Mahmudi, 2011).

Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu kelompok desa, sehingga menjadi gambaran penting bagi suatu kelompok desa untuk bekerja secara terbuka dalam setiap rencana pembangunan yang ada. Memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Abdul Hafiz Tanjung, 2014).

Keterbukaan tidak hanya membantu menginformasikan kepada publik, tetapi merupakan bentuk upaya peningkatan partisipasi atau partisipasi publik dan kesadaran penyelenggaraan negara, khususnya pelayanan publik. Menurut data Ombudsman RI tahun 2020, permasalahan desa yang dilaporkan mencapai 286 pengaduan yang dimana kecamatan parongpong kabupaten bandung barat masuk kedalamnya. Persoalannya, tidak bisa melayani masyarakat dalam bentuk permintaan keterbukaan informasi terkait proyek tertentu menggunakan dana desa (www.ombudsman.go.id).

Penelitian yang di garap oleh Deki Putra (2014) menyatakan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD, dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan nilai thitung $5,211 > t_{tabel} 1,6602$. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Martdian Ratna Sari (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,477 dengan p-value $< 0,01$ dan memiliki effect sizes sebesar 0,333. Nilai effect sizes sebesar 0,333 tergolong kuat. Hal ini juga didukung dengan

penelitian dari Dana Naous, Dkk (2019) menyatakan bahwa variabel keterbukaan informasi berpengaruh terhadap kinerja layanan.

2. KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Pemegang amanah (*agent*) yang wajib memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala kegiatan dan kegiatan pertanggungjawabannya kepada pihak amanah (*settlor*) yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Mardismo,2018:27). Akuntabilitas Merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan (Moh Khusaini,2018:17). Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan terkait kinerjanya. Akuntabilitas itu sendiri.

Indikator Akuntabilitas dapat diukur dengan karakteristik yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19) berikut ini :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Keterbukaan Informasi

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH) tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang dalam Buku Yayasan TIFA (2010:08), hak asasi manusia diberlakukan sebagai pengakuan atas hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mengakses informasi, pernyataan berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 Perubahan Kedua Pasal F menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menggunakan semua saluran yang tersedia untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi”

Keterbukaan informasi adalah salah satu sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya (Erlina Hasan,2010:118).

Indikator Keterbukaan Informasi dapat diukur dengan prinsip – prinsip yang bersumber dari Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015:7) berikut ini :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani

Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah garis besar tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/rencana/kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Mahsun,2013). Kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja suatu perusahaan, analisis kinerja digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif (Lilis puspitawati,2011:159). Sebagai catatan dari hasil yang dicapai pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya dalam waktu tertentu (Ratu Wardarita,2017).

Indikator Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan karakteristik Mahsun (2012:148), berikut ini :

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*).
3. Indikator Keluaran (*Output*)
4. Indikator Hasil (*Outcomes*)
5. Indikator Manfaat (*Benefit*)
6. Indikator Dampak (*Impact*)

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Berdasarkan dari teori yang dinyatakan oleh Verawaty (2017) Pemerintah daerah memiliki “tanggung jawab” ketika bertindak untuk kepentingan mereka dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Tingkat akuntabilitas yang tinggi, terutama di antara para pemimpin, membangun kepercayaan di antara pemerintah daerah yang ada. Mengetahui bahwa pemimpin mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka membawa tingkat kepercayaan yang tinggi kepada jajaran pemerintah daerah yang relevan.

Perizzo & Stepenhurst (2013) juga mengatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan dapat terjamin jika tanggung jawab atau akuntabilitas sudah mapan dalam sistem pemerintahan daerah. Selain itu, tinjauan akuntabilitas menilai bagaimana pemerintah daerah menggunakan dana dan sumber daya publik. Evaluasi apakah pemerintah memiliki kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa karyawan tidak menyalahgunakan sumber daya. Kami juga memastikan bahwa pemerintah mematuhi undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur internal. Akuntabilitas membuat kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan akan lebih efektif bila ada akuntabilitas. Pada akhirnya, akuntabilitas menjadi penting dalam tata kelola, termasuk di sektor keuangan, terutama dalam penganggaran berbasis kinerja (Hudayah, 2012).

Pengaruh Keterbukaan terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori S.F. Marbun (2013) Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perwujudan kehidupan bernegara dan bernegara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus mengedepankan keterbukaan informasi dalam kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terpenting. Warga negara berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga memudahkan terciptanya good and clean governance, karena pemerintah dan lembaga publik berkewajiban memberikan informasi yang lengkap.

Elsie Swanda & Muchidin (2016) mengatakan bahwa aspek keterbukaan informasi pemerintah daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan membuatnya lebih stylish, sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuat kerja pemerintah daerah menjadi jelas (*obvious*) dan terbuka Artinya, keterbukaan saat melakukan proses aktivitas. Prasyarat utama untuk membangun tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dalam semua kebijakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan pemerintah, yang dapat mendorong keadilan. Dengan demikian, keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dan verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan, kondisi, dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana peneliti memperoleh data secara langsung, dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara langsung dengan para aparatur/pegawai desa di setiap Satuan Kerja Desa (SKPDDes) untuk masing-masing desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang atau responden pada desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Probability Sampling*.

Pengujian yang digunakan menguji kuesioner adalah uji validitas dan realibilitas, teknik analisis dalam penelitian adalah pengujian deskriptif, uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi person, dan koefisien determinasi. Teknis analisis data dengan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan Software SPSS 26.0.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Akuntabilitas

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari Variabel Akuntabilitas sebesar 429 (77%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Akuntabilitas berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 23% yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Variabel Akuntabilitas.

Analisis Deskriptif Keterbukaan Informasi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari Variabel Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebesar 700 (78%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Keterbukaan Informasi berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 22% yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Variabel Keterbukaan Informasi.

Analisis Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari Variabel Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah sebesar 674 (80%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 20% yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Variabel Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah.

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil uji validitas dari ketiga variable ini memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 ($>0,30$), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variable lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (*reliabel*) atau andal.

Hasil Analisis Verifikatif

Tujuan utama dari analisis verifikatif adalah untuk mengetahui hubungan atau pengaruh keterbukaan informasi terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah Pada Kabupaten Bandung Barat. Dimana untuk melakukan analisis verifikatif dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi (*pearson product moment*), analisis koefisien determinasi serta pengujian hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan tes *Kolmogrov Smirnov*. dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) atau probabilitas sebesar $0.200 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh residual variable terdistribusi secara normal, sehingga telah memenuhi asumsi normalitas dan selanjutnya dapat digunakan untuk analisis regresi yang memenuhi uji normalitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. . Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Pengujian multikolinearitas penelitian ini menunjukkan bahwa tolerance untuk Akuntabilitas adalah 0,836 dengan nilai VIF 1,196, dan Keterbukaan Informasi Adalah 0,836 dengan VIF 1,196. Oleh karena itu tidak terdapat gejala multikolinearitas karena nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016:192) Analisis regresi linier berganda adalah Regresi dengan satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Persamaan regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y= Variabel Y

α = Konstanta persamaan regresi

β_1 = Koefisien regresi variabel X1

β_2 = Koefisien regresi variabel X2

X1= Variabel X1

X2 = Variabel X2

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.394	2.752		1.233	.226
AKUNTABILITAS	.517	.215	.339	2.407	.022
KETERBUKAAN INFORMASI	.592	.176	.474	3.367	.002

a. Dependent Variable: KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

Dari tabel 4.26 di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.394 + 0.517X_1 + 0.592X_2$$

Dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta 3.394, artinya jika Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi bernilai nol (0), maka Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah akan bernilai 3.844.
- Nilai Koefisien regresi Akuntabilitas $b_1 = 0.517$ menyatakan bahwa Akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah akan meningkat sebesar 0.517 satuan.
- Nilai Koefisien regresi Keterbukaan Informasi $b_2 = 0.592$ menyatakan bahwa jika Keterbukaan Informasi meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah akan meningkat sebesar 0.592 satuan

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi Akuntabilitas dengan jumlah 28,2% sedangkan Keterbukaan Informasi dengan jumlah 37,4%. Hal ini menunjukkan besar pengaruh akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 71,8% dan 63,6% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain, seperti variable yang peneliti tidak teliti.

Tabel 4. Koefisien Determinasi Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.260	3.483164

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

nilai koefisien determinasi (R Square) dari perhitungan $K_d = (0.531)^2 \times 100\% = 28,2\%$.

Tabel 5. Koefisien Determinasi Keterbukaan (Transparansi) Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 ^a	.374	.355	3.252740

a. Predictors: (Constant), KETERBUKAAN INFORMASI

b. Dependent Variable: KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

nilai koefisien determinasi (R Square) dari perhitungan $Kd = (0.611)^2 \times 100\% = 37,4\%$.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel 6. Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.394	2.752		1.233	.226
AKUNTABILITAS	.517	.215	.339	2.407	.022
KETERBUKAAN INFORMASI	.592	.176	.474	3.367	.002

a. Dependent Variable: KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

Hipotesis Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai thitung > ttabel ($2,407 > 2,037$). Kemudian signifikasi $0.022 < 0.339$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah.

Hipotesis Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai thitung > ttabel ($3,367 > 2,037$). Kemudian signifikasi $0.002 < 0.474$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Keterbukaan (Transparansi) Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,407 lebih besar dari t_{tabel} (2,037) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1. Artinya Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah pada 7 desa pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDDes) untuk masing-masing desa di Kecamatan Parongpong.

Hasil pengujian korelasi menunjukkan r bernilai positif sebesar 0,531 artinya Akuntabilitas memiliki hubungan yang sedang terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah, hubungan yang positif artinya setiap kenaikan Akuntabilitas maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Verawaty (2017:56), dapat diaktakan jika akuntabilitas (tanggung jawab) yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah 'bertanggung jawab' jika pemilih dapat membedakan apakah pemerintah bertindak untuk kepentingan mereka dan memberikan sanksi yang tepat kepada mereka. Tingkat akuntabilitas yang tinggi, terutama di antara para pemimpin, membangun kepercayaan di dalam pemerintahan daerah yang ada. Mengetahui bahwa pemimpin mereka akan bertanggung jawab atas keputusan mereka menanamkan tingkat kepercayaan yang tinggi pada jajaran pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Koefisien determinasi, akuntabilitas berpengaruh sebesar 28,2% terhadap Pelayanan Pemerintahan Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,531 yang berarti akuntabilitas memberikan pengaruh yang sedang arah positif terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah. Sedangkan sisanya terdapat faktor lain sebesar 71,8% yang tidak diteliti. Hubungan yang positif artinya setiap kenaikan akuntabilitas maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Deki Putra (2014) menyatakan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD, dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,211 > t_{tabel} 1,6602$. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Martdian Ratna Sari (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,477 dengan $p\text{-value} < 0,01$ dan memiliki effect sizes sebesar 0,333. Nilai effect sizes sebesar 0,333 tergolong kuat. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Samalagi (2021) menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai signifikansi ($P\text{-Value}$) = $0,035 < 0,05$ dan T_{hitung} sebesar 2,508 dengan nilai T_{tabel} yaitu 2,037.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Akuntabilitas mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 77% dan termasuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Akuntabilitas. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dengan persentase 66%, terdapat gap sebesar 34% yang merupakan masalah yang ada pada Akuntabilitas

Dengan ini penelitian telah menjawab fenomena yang dihadapi dalam meningkatkan Akuntabilitas. Kurangnya sikap patuh dan tanggung jawab dalam pengimplementasian pedoman Standar Pelayanan Publik membentuk peristiwa maladministrasi. Maladministrasi diakibatkan oleh tindakan aparatur negara seperti prosedur yang kurang ditekankan, periode pelayanan yang tidak pasti, pungutan tanpa adanya peraturan yang jelas, korupsi, layanan izin administrasi yang tidak pasti, kesemena-menaan. Hasan selamat menggungkapkan hal ini secara makro berimbas pada lemahnya pertanggungjawaban pemerintah dalam melayani masyarakat.

Pengaruh Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,367 lebih besar dari t_{tabel} (2,037) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1. Artinya Keterbukaan Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah pada 7 desa pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDes) untuk masing-masing desa di Kecamatan Parongpong. Hasil pengujian korelasi menunjukkan r bernilai positif sebesar 0,611 artinya Keterbukaan Informasi memiliki hubungan yang Kuat terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah, hubungan yang positif artinya setiap kenaikan Keterbukaan Informasi maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah dan begitupun sebaliknya.

Teori ini sesuai dengan S.F.Marbun (2013:36) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia dan sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bersih. Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah mengedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok, karena masyarakat berhak untuk mengetahui kegiatan – kegiatan pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, karena pemerintah maupun badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kegiatan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil Koefisien determinasi, Keterbukaan Informasi berpengaruh sebesar 37,4% terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,611 yang berarti Keterbukaan Informasi memberikan pengaruh yang Kuat arah positif terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Sedangkan sisanya terdapat faktor lain sebesar 72,6% yang tidak diteliti. Hubungan yang positif artinya setiap kenaikan Keterbukaan Informasi maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan Daerah dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Nur Laily Qomariyah (2018) Menyatakan bahwa variabel kinerja pelayanan dalam menyediakan akses publik terhadap informasi di PPID Dinas Kesehatan Jawa Timur terdapat hubungan atau pengaruh sebesar 98,1% dengan nilai signifikansi 0,019 atau 1,9%. Lalu hasil penelitian Ulfa Maslakhatul Khasanah & Amin Sadiqin (2021) menyatakan penerapan prinsip keterbukaan informasi memberikan dampak positif yang nyata bagi kinerja para karyawan. Dan oleh penelitian Hardiningsih (2020) mengemukakan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan pasar antara indonesia dan malaysia.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Keterbukaan Informasi mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 78% dan

termasuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Keterbukaan Informasi. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Indikator Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik dengan persentase 68%, terdapat gap sebesar 33% yang merupakan masalah yang ada pada Keterbukaan Informasi

Dengan ini penelitian telah menjawab fenomena yang dimana Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2020, permasalahan desa yang dilaporkan mencapai 286 pengaduan. Persoalannya, tidak bisa melayani masyarakat dalam bentuk permintaan informasi terkait proyek tertentu menggunakan dana desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah. Maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah. Maka semakin baik Akuntabilitas maka Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Akuntabilitas memiliki kontribusi yang sedang terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, terutama dalam Indikator Akuntabilitas program, namun saat ini masih terdapat kelemahan dalam Akuntabilitas, salah satunya indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran hal tersebut menandakan masih belum optimalnya akuntabilitas pada 7 desa di kecamatan parongpong kabupaten bandung barat.
2. Keterbukaan Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah. Maka semakin baik Keterbukaan Informasi maka Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah akan meningkat. Dimana Keterbukaan Informasi yang baik akan berdampak pada peningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, namun saat ini masih terdapat kelemahan terkait Keterbukaan Informasi salah satunya indikator Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani hal tersebut menandakan masih belum optimalnya Keterbukaan Informasi pada 7 desa di kecamatan parongpong kabupaten bandung barat.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. 2011. "Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik". Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Lembaga Bantuan HukumS (LBH) Masyarakat kerjasama Yayasan TIFA. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pelitaraaya Selaras.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor public Edisi Satu. Andi: Yogyakarta.

- Mahsun. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 51-60.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK SERTA FUNGSI PEMERIKSAAN INTEN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Rosita, R., & Asrini. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi). *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 7(1), 133–141. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.377>
- Samalagi, Asri. 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. *Economics Bosowa*. 7(4), 306-316. <https://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/567>